

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA
PELAYANAN PUBLIK PADA BIDANG PENDIDIKAN
(Studi pada Kinerja Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan
dalam Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Kecamatan
Kutawaluya Kabupaten Karawang)**

Sah Tedja Kusuma¹, Dadan Kurniansyah², Rachmat Ramdani³

Universitas Singaperbangsa, Karawang, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: sah.tedja.kusuma@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini di latarbelakangi oleh keadaan Sekolah Dasar di Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang sebagian besar memiliki sarana dan prasarana minim terlihat dari ruang sekolah yang mengalami kerusakan. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kegiatan belajar mengajar (KBM), bahwasanya pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana merupakan tanggungjawab Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan (Korwilcambidik) Kutawaluya sebagai organisasi pemerintah digarda terdepan dalam melakukan pelayanan terhadap segala kebutuhan Sekolah Dasar (SD) baik dalam fisik maupun administrasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja organisasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan (Korwilcambidik) Kutawaluya dalam pengadaan sarana dan prasarana di Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan memperoleh informasi dari informan yang telah ditentukan. Penelitian ini menggunakan basis analisis dalam mengukur kinerja organisasi dari Soesilo (2014) yang terdiri dari aspek struktur organisasi, kebijakan pengelolaan, sumber daya manusia (SDM), sistem informasi manajemen, serta sarana dan prasarana. Hasil penelitian menunjukan kinerja organisasi Korwilcambidik Kutawaluya dalam Pelayanan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang belum terlaksana secara optimal. Hal tersebut terlihat dari kurangnya kemampuan aparatur dalam melaksanakan pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsinya, terkendalanya sinkronisasi data yang akurat mengenai kebutuhan rill di terkait sarana dan prasarana di 26 Sekolah Dasar (SD), belum menggunakan prinsip the right man on the right place dalam organisasi, di samping penguasaan teknologi informasi komunikasi yang masih minim dari lemahnya skill aparatur, kondisi tersebut diperparah dengan ketiadaan kendaraan operasional, yang berdampak dari tidak optimalnya kinerja Korwilcambidik Kutawaluya.

Kata Kunci: Kinerja, Pelayanan publik, Korwilcambidik.

ABSTRACT

This research is motivated by the condition of elementary schools in Kutawaluya District, Karawang Regency, most of which have minimal facilities and infrastructure, seen from the damaged school room. This is very influential on teaching and learning activities (KBM), that the fulfillment of facilities and infrastructure is the responsibility of the Regional Coordinator for Education (Korwilcambidik) Kutawaluya as a government organization at the forefront of providing services to all primary school (SD) needs both in physical and administrative terms. The purpose of this study was to determine the performance of the Kutawaluya Regional Coordinator for Education (Korwilcambidik) in the provision of facilities and infrastructure in public elementary schools in Kutawaluya District, Karawang Regency. This study uses a descriptive method with a qualitative approach, by obtaining information from predetermined informants. This study uses the basis of analysis in measuring organizational performance from Soesilo (2014) which consists of aspects of organizational structure, management policies, human resources (HR), management information systems, and facilities and infrastructure. The results showed that the performance of the Korwilcambidik Kutawaluya organization in the service of facilities and infrastructure for public elementary schools in Kutawaluya District, Karawang Regency has not been optimally implemented. This can be seen from the lack of ability of the apparatus in carrying out work according to their main duties and functions, constraints on synchronization of accurate data regarding real needs related to facilities and infrastructure in 26 elementary schools (SD), not using the principle of the right man on the right place in organizations, In addition to the minimal mastery of information and communication technology due to the weak skills of the apparatus, this condition is exacerbated by the absence of operational vehicles, which results from the suboptimal performance of the Kutawaluya Korwilcambidik.

Keywords: *Performance, public services, Korwilcambidik.*

PENDAHULUAN

Pendidikan di Indonesia sebagai sub sistem dari pembangunan nasional dituntut kesiapannya untuk berdaya dan mampu menghadapi tantangan diberbagai persoalan sebagai akibat adanya arus globalisasi. Senada dengan konteks tersebut Hartato (2008;2) mengemukakan permasalahan pokok pendidikan di Indonesia meliputi empat hal tersebut terkait erat dengan pemerataan pendidikan, mutu pendidikan, efisiensi pendidikan dan

relevansi pendidikan. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan pendidikan tersebut, salah satunya melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar.

Terdapat banyak faktor atau penyebab yang mempengaruhi optimalnya kinerja dalam pelayanan terutama pendidikan, baik yang dilakukan pemerintah atau pihak

swasta. Ihwal tersebut berimbas terhadap *output* sebagai artikulasi berupa mutu pendidikan. Salah satu faktor tersebut dapat diidentifikasi dari suprastruktur dan infrastruktur yang menaungi bidang pendidikan seperti dikemukakan di atas. Kapasitas suprastruktur dan infrastruktur tersebut otomatis sebagai faktor penentu antara mutu pendidikan di kota dan di desa.

Sejatinya pembangunan infrastruktur dalam sektor pendidikan sendiri diperlukan sebagai motor pendukung kegiatan belajar mengajar (KBM). Kebutuhan pembangunan infrastruktur dalam sekolah merupakan kebutuhan mutlak penyangga kualitas pendidikan. Dapat dikatakan sarana dan prasarana fisik di samping kemampuan profesional tenaga pengajar dan teknologi memainkan peranan krusial dalam sekolah akan mendorong kemajuan sekolah tersebut.

Kondisi di Kabupaten Karawang sendiri terdapat ribuan ruang kelas Sekolah Dasar (SD) rusak dan rawan ambruk. Hal tersebut berbanding terbalik dengan kenaikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Karawang dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Data tahun 2018 menyebutkan pendapatan Karawang diproyeksikan sekitar Rp. 4 triliun dengan belanja daerah hingga Rp 4,33 triliun. Ditambah dengan pengalihan kewenangan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang menjadi kewenangan Provinsi, otomatis terdapat anggaran lebih untuk dialokasikan membangun infrastruktur sekolah.

Permasalahan pendidikan di Kabupaten Karawang masih terdapat kesenjangan yang dipengaruhi berbagai faktor, dalam mengurangi kesenjangan tersebut baru-baru ini pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019 telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp. 54,5 miliar ke Disdikpora Kabupaten Karawang guna memperbaiki mutu pendidikan seperti pembangunan ruang kelas baru (RKB), pembangunan jamban, sarana pendidikan dan olah raga dan kesehatan (PJOK) dan alat kesenian serta rehab sekolah dasar (Kasi Sarana dan Prasarana Disdikpora Kabupaten Karawang, 2019).

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Karawang tahun 2018, terdapat lebih dari seribu ruang kelas di Kabupaten Karawang mengalami kerusakan serta kekurangan sarana dan prasarana, dan ratusan lainnya memerlukan ruang kelas baru (RKB). Tabel 1 berikut merupakan jumlah ruang kelas rusak dan kebutuhan kelas baru di Kabupaten Karawang tahun 2018.

Tabel 1 Jumlah Ruang Kelas Rusak Dan Kebutuhan Ruang Kelas Baru (RKB) Di Kabupaten Karawang Tahun 2018

JENIS	Kelas Rusak Ringan	Kelas Rusak Berat	Butuh Ruan g Kelas Baru
Jumlah	703 Kelas	575 Kelas	407 Kelas
Total	1.685		

Sumber: Olahan Peneliti, 2019.

Faktor supastuktur dan infrastuktur menjadi permasalahan krusial berkepanjangan yang di hadapai sebagian besar Sekolah Dasar Negeri khususnya di Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang. Guna memaksimalkan terselenggaranya pendidikan yang berkualitas dibentuk Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan (Korwilcambidik) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang, tertuang berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 25 Tahun 2018. Sebelum dikenal dengan Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan (Korwilcambidik) lembaga/ogranisasi tersebut bernama Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendidikan Dasar, yang kemudian berganti menjadi UPTD TK dan SD, kemudian UPTD PAUD dan SD. Sampai pada UPTD Pendidikan sebelum pada penetapan saat ini menjadi Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan (Korwilcambidik).

Guna memaksimalkan terselenggaranya pendidikan terkait pemenuhan sarana dan prasarana

merupakan tugas dari Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan, memiliki tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, di antaranya; a. pengkoordinasian penyelenggaraan manajemen pendidikan meliputi pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal di wilayah kerjanya; b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan manajemen pendidikan meliputi pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal di wilayah kerjanya; dan c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Memperbaiki kondisi penyelenggaraan pendidikan tersebut diperlukan kinerja yang optimal dari Korwilcambidik. Dalam bahasa Inggris istilah kinerja adalah *performance*. *Performance* merupakan kata benda, salah satu *entry*-nya adalah "*thing done*" (sesuatu hasil yang telah dicapai). Jadi arti *performance* atau kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. Dengan demikian penelitian ini mengulas "Kinerja Pelayanan Publik Pada Bidang Pendidikan (Studi Pada Kinerja Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Dalam Pemenuhan

Sarana Dan Prasarana Sekolah Dasar Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang)”.
standard dan tujuan organisasi;

KAJIAN PUSTAKA

Di era globalisasi dan ditopang teknologi yang semakin canggih membuat semakin banyak faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi baik publik maupun swasta. Secara detail Ruky (2006) mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh langsung terhadap tingkat pencapaian kinerja organisasi sebagai berikut:

- a. Teknologi yang meliputi peralatan kerja dan metode kerja yang digunakan untuk menghasilkan produk dan jasa yang dihasilkan oleh organisasi, semakin berkualitas teknologi yang digunakan, maka akan semakin tinggi kinerja organisasi tersebut;
- b. Kualitas *input* atau material yang digunakan oleh organisasi;
- c. Kualitas lingkungan fisik yang meliputi keselamatan kerja, penataan ruangan, dan kebersihan;
- d. Budaya organisasi sebagai pola tingkah laku dan pola kerja yang ada dalam organisasi yang bersangkutan;
- e. Kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan anggota organisasi agar bekerja sesuai dengan

- f. Pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi aspek kompensasi, imbalan, promosi, dan lain-lainnya”.

Secara umum faktor menurut Ruky mengarah kepada pengeolaan internal organisasi yang mana pencapaian kinerja birokrasi saat ini sangat dipengaruhi oleh teknologi pendukung baik dari aspek metode dan peralatan yang digunakan. Berkorelasi dengan budaya organisasi dan kepekaan kepemimpinan organisasi yang dijadikan motor dalam mengelola input yang pada saat ini dituntut memiliki hasil yang berkualitas lagi tepat sasaran sebagai proteksi dalam menghadapi permasalahan dimasa yang akan datang.

Lebih lanjut menurut penelitian mengenai Kinerja Kowrilcambidik Dalam Pelayanan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang menggunakan basis analisis atau teori kinerja organisasi yang dikemukakan oleh Seosilo (2014) yang terdiri dari lima dimensi yaitu, 1) dimensi struktur organisasi, 2) dimensi kebijakan pengelolaan, 3) dimensi sumber daya manusia, 4) dimensi sistem informasi manajemen, dan 5) sarana dan prasarana, dari berbagai aspek tersebut basis analisis dalam penelitian ini berorientasi terhadap aspek/ dimensi Sumber Daya Manusia (SDM), serta sarana dan prasarana.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Lexy Maleong, 2006: 3). Creswell (2015:63-64) menyatakan bahwa “metode kualitatif dipilih karena penelitian ini menekankan pada proses bukan pada hasil”.

Bogdan dan Taylor dalam Moloeng (2007:4) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Lebih lanjut Moleong (2007:11) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif menekankan pada data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Hal tersebut agar dapat memberikan gambaran mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan publik pada bidang pendidikan.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara observasi dan wawancara secara mendalam (*in-depth interview*), yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dan lisan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dengan narasumber di

lokasi penelitian yaitu: Kepala Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang, Kepala Disdikpora Kabupaten Karawang, Kepala Sekolah, dan Komite Sekolah.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin (2003:70), yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, verifikasi dan penegasan kesimpulan. Sedangkan teknik pemeriksaan kredibilitas/derajat kepercayaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *triangulasi* sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumber Daya Manusia Sebagai Faktor Kunci

Manusia merupakan aktor esensial sebagai implementor dalam mengelola alam. Sadono Sukirno (2006:172) mendefinisikan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah orang-orang yang berada dalam organisasi berkontribusi memberikan sumbangan pemikiran dan melakukan berbagai jenis pekerjaan dalam mencapai tujuan organisasi. Bahwasanya sumbangan yang dimaksud adalah pemikiran dan pekerjaan yang mereka lakukan diberbagai kegiatan dalam organisasi/perusahaan. Dalam konteks melihat sumber daya manusia, yang dicermati bukanlah sebatas terhadap tenaga ahli, atau tenaga berpengalaman namun seluruh tenaga kerja/orang-

orang dalam upaya mewujudkan tujuan perusahaan/organisasi. Senada dengan hal tersebut Soesilo (2014) menjelaskan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) erat berhubungan dengan kualitas karyawan untuk bekerja dan berkarya secara optimal.

Kata Sumber Daya Manusia menurut Susilo (1992:2) diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan atau kemampuan memperoleh keuntungan dari kesempatan-kesempatan tertentu, atau meloloskan diri dari kesukaran sehingga perkataan sumber daya tidak menunjukkan suatu benda, namun dapat berperan dalam suatu proses atau fungsi oprasional dalam mencapai tujuan tertentu seperti dalam memenuhi kepuasan. Artinya SDM merupakan abstraksi yang mencerminkan/mengartikulasikan aspirasi manusia yang berhubungan dengan suatu fungsi atau operasi.

Dalam setiap penyelenggaraan organisasi baik oleh lembaga publik maupun swasta SDM secara langsung memainkan peranan kunci dalam mencapai tujuan organisasi. Ihwal tersebut berperan penting dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik pada bidang pendidikan yang sebagian besar keberhasilan dan kualitas pelayanan yang diberikan berakar dari profesionalitas Sumber Daya Manusia Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dalam rangka mengakomodir kepentingan sekolah di Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang.

Profesionalitas dan kelengkapan personil atau aparatur merupakan salah satu perangkat penting dalam mencapai tujuan organisasi. Kondisi yang ada pada Korwilcambidik Kutawaluya Kabupaten Karawang sejatinya telah memiliki kelengkapan aparatur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Artinya aparatur yang ada di Korwilcambidik secara makro sudah dapat melaksanakan apa yang menjadi tugas dan fungsinya. Namun kondisi di lapangan kelengkapan tersebut masih memiliki kelemahan berupa kemampuan (*skill* dan kompetensi) dalam pelaksanaan tugasnya secara individual secara profesional, artinya penempatan aparatur tersebut belum memenuhi prinsip *the right man on the right place* dan berakibat hasil kerja yang tidak optimal.

Kondisi tersebut merupakan manifestasi dari dampak berkepanjangan yang menggambarkan tidak selektifnya Korwilcambidik Kutawaluya dalam melakukan perekrutan pegawai yang mengisi jabatan-jabatan oprasional. Kemahiran SDM sejatinya dapat dikatakan krusial, hal tersebut merupakan kesalahan awal dan pada akhirnya menimbulkan patologi operasional dalam memenuhi tuntutan pekerjaan.

Korwilcambidik Kutawaluya belum dapat secara penuh atau optimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Karena minimnya penguasaan komputerisasi sebagian tenaga oprasional. Dampak selanjutnya sebagai efek domino yaitu tidak

selesainya secara tuntas tugas pegawai tersebut syang pada akhirnya dilimpahkan pada pegawai lain yang dianggap menguasai komputerisasi. Akhirnya terjadi penumpukan beban kerja secara berlebih pada satu atau sebagian orang, secara umum fenomena pelimpahan tugas tersebut sangat mengganggu tercapainya target-target yang telah menjadi ketetapan dan berujung pada buruknya kinerja organisasi Korwicambidik Kutawaluya dalam mengakomodir kebutuhan sarana dan prasarana Sekolah Dasar.

Berdasarkan uraian mengenai kinerja organisasi Korwilcambidik Kutawaluya terkait aspek Sumber Daya Manusia (SDM) dapat dikatakan bahwasanya masih belum optimal dibeberapa bagian, salah satunya belum menempatkan prinsip *the right man on the right place* sebagai landasan dasar dalam upaya pelayanan penyelenggaraan pendidikan. Hal tersebut didukung oleh lemahnya skill terkait penguasaan teknologi informasi komunikasi oleh sebagian besar aparatur yang menyebabkan pelimpahan beban kerja berlebih pada satu atau sebagian orang.

Terkait dengan penguasaan TIK merupakan sebuah ciri organisasi pada abad ke-21, dapat dikatakan kekuatan TIK merupakan penopang esensial organisasi baik publik maupun swasta. Berkaca terhadap kondisi Korwilcambidik Kutawaluya masih belum dapat mengikuti perkembangan cara kerja digital, hal tersebut terlihat dari banyaknya layanan yang harus

langsung diurus melalui tatap muka, di samping koordinasi kedua lembaga (Korwilcambidik dan Disdikpora Karawang) belum optimal terbukti dengan lemahnya sinkronisasi terhadap kelengkapan pegawai/staf.

Tidak dapat dipungkiri bahwa cara lama dalam penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan Korwilcambidik Kutawaluya melalui pelayanan administrasi langsung atau *face to face* dirasakan sudah cukup profesional, disiplin aparatur, dengan kesiap siagaan, respon yang cepat dan keramahan dalam melakukan pelayananan. Namun pelayanan yang masih menggunakan cara lama tersebut berdampak hasil kerja yang tidak efektif dan efisien. Di samping berdampak terhadap lemahnya pengelolaan *database* di Korwilcambidik Kutawaluya yang saat ini masih berada dalam cakupan bersifat internal, hal tersebut menegaskan belum adanya transparansi organisasi tersebut.

Artinya Korwilcambidik Kutawaluya Kabupaten Karawang sendiri masih berkuat pada permasalahan patologi operasional karena kurangnya *skill* dan kompetensi aparatur atau pegawai dalam melakukan pelayanan prima terhadap sekolah dasar. Pelayanan prima sendiri merupakan salah satu ciri organisasi di era globalisasi saat ini, dengan mengangap objek yang dilayani sebagai konsumen yang harus dengan cepat dan segera serta berkualitas diberikan dan mendapatkan layanan yang diinginkan

sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Urgensi aparatur melekat teknologi informasi berbasis internet perlu segera dilakukan pembenahan, khususnya yang berada pada tingkat kecamatan seperti Korwilcambidik seluruh Kabupaten Karawang. Berdasarkan hasil penelitian hal tersebut sangat logis untuk direalisasikan, berkaca terhadap kondisi organisasi pada *level* terdepan di Kabupaten Karawang saat ini yang masih minim penguasaan IT/TIK. Jika ditelisik problematika terkait penguasaan TIK sangat berhubungan dengan data, dan data merupakan merupakan salah satu tulang punggung dalam merencanakan, merealisasikan, dan mengevaluasi hasil capaian dari tugas pokok dan fungsi yang telah tersusun dalam program kerja, berupa penemuan sarana dan prasarana serta pelayanan administrasi tenaga kependidikan oleh Korwilcambidik Kutawaluya.

Idealnya dalam menyikapi permasalahan tersebut dilakukan peningkatan kapasitas pegawai/aparatur melalui kegiatan bimbingan dan pelatihan secara berkala dan berkelanjutan sebagai tindakan nyata menyikapi permasalahan klasik dikebanyakan organisasi pemerintah. Terlebih melihat besarnya tugas organisasi Korwilcambidik / UPTD dalam memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan pelaksanaan pelatihan dan pengembangan pendidikan, pengelolaan dokumentasi,

layanan informasi, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat. Tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan bidang pendidikan, yang meliputi perumusan kebijakan, pembiayaan, kurikulum, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, dan pengendalian mutu pendidikan serta tugas perbantuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Optimalisasi Penopang Melalui Sarana Dan Prasarana

Perkembangan teknologi pada abad ke 21 merupakan keniscayaan yang tidak dapat dipungkiri. Penggunaan alat yang kian canggih semakin dirasakan dalam mempermudah pekerjaan manusia, baik secara individual, kelompok maupun masa begitupun dalam penyelenggaraan pelayanan pada bidang pendidikan.

Perkembangan teknologi berdasarkan kriteria dapat dibedakan berdasarkan cara dan alat atau fisik yang berwujud sarana dan prasarana. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI,2007:999) sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, alat, media. Masih dalam sumber yang sama bahwa prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya). Sedangkan Soesilo (2014) mendefinisikan sarana dan prasarana yang dimiliki, yang berhubungan dengan penggunaan teknologi bagi

penyelenggaraan organisasi pada setiap aktivitas organisasi.

Berdasarkan kondisi di lapangan terkait dengan tugas Korwilcambidik Kutawaluya dalam mengakomodir kebutuhan pemenuhan sarana dan prasarana sekolah dasar yang merupakan kewenangan di wilayah kerjanya, bahwa Korwilcam bidik belum dapat memenuhi atau mengakomodir kebutuhan sarana dan prasarana SD di Kecamatan Kutawaluya secara maksimal. Ihwal tersebut selaras dengan minimnya sarana dan prasarana oprasional di kantor Korwilcambidik Kutawaluya Kabupaten Karawang tersebut.

Kekurangan tersebut menjadi sebuah dilema dalam upaya penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang optimal. Terkait kelengkapan tesebut sejatinya telah dijamin terselenggaranya tugas dan fungsi organsiasi dengan baik telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam pasal 1 huruf (a) disebutkan bahwa standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, dan kendaraan dinas. Bahwasanya dengan mengacu pada penggalan Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 tersebut Korwilcambidik Kutawaluya merupakan organisasi yang belum memiliki kelengkapan sarana dan

prasarana minimal yang sesuai dalam menunjang kelancaran tugasnya.

Kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Karawang khususnya di Kecamatan Kutawaluya menunjukkan bahwa sebagian besar Sekolah Dasar mengalami kekurangan sarana dan prasarna serta kerusakan gedung/kelas, keadaan rusak sedang maupun rusak berat. Dapat dilihat pada Tabel 2 merupakan kondisi sekolah dasar yang terdapat di Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang, yaitu:

Tabel 2 Kondisi Umum Sekolah Di Kecamatan Kutawaluya

NO	Ruang Kelas	Kondisi/Keadaan		
		Baik	Sedang	Rusak
1	171	82	30	59
2	Usulan DAK 2019	RKB	Rehab	Perpus
		9	53	7

Sumber: Korwilcambidik Kutawaluya, 2018.

Berdasarkan data laporan Korwilcambidik Kecamatan Kutawaluya Tahun 2018 tercatat bahwa, terdapat sebanyak 27 Sekolah Dasar dengan total ruang sebanyak 171 kelas, dengan kondisi ruangan baik sebanyak 82, rusak sedang sebanyak 30, dan rusak berat sebanyak 59 ruang. Menyikapi hal tersebut Korwilcambidik Kec. Kutawaluya mengajukan usulan Dana Alokasi Khusus untuk pembangunan ruang kelas baru (RKB) sebanyak 9 lokal, renovasi sebanyak 53 lokal, dan pengajuan perpustakaan sebanyak 7

lokal (Korwilcambidik Kec. Kutawaluya, 2018).

Ihwal kondisi tersebut menunjukkan masih dominannya ruang kelas yang mengalami kerusakan, baik kerusakan sedang maupun berat, yang otomatis berdampak pada tidak optimalnya kegiatan belajar mengajar disebagian besar Sekolah Dasar yang berada di Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang. Mengenai pengadaan sarana dan prasarana lebih lanjut disebutkan dalam PP No. 9 Tahun 2005 administrasi pengadaannya meliputi 5 hal, yaitu: 1. Penentuan kebutuhan, 2. Proses pengadaan, 3. Pemakaian, 4. Pencatatan atau pengurusan, dan 5. Pertanggungjawaban.

Komponen yang paling strategis dan sistematis di antara komponen-komponen yang dikemukakan di atas adalah komponen penyediaan sarana dan prasarana selain pengajar atau guru, terutama yang berkenaan sebagai pendukung kinerja guru dalam menampilkan kemampuan profesionalnya. Yang mana hal tersebut sangat bergantung dari kinerja Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dalam memenuhi kebutuhan sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan di wilayahnya.

Berkaca dari salah satu fungsi dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan pendidikan oleh Korwilcambidik yaitu melakukan koordinasi penerapan kebijakan, pembangunan dan pelaksanaan pengelolaan pembiayaan, kurikulum,

sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, serta pengendalian mutu pendidikan. di samping melakukan penyelenggaraan pengendalian mutu pendidikan, pemantauan dan analisa kelayakan kurikulum, sarana dan prasarana, serta pembinaan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan.

Ketercapaian tujuan tugas dan fungsi tersebut idealnya diawali oleh kelengkapan sarana dan prasarana minimal organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah. Salah satu kekosongan dari standar yang idealnya terpenuhi yaitu tersedianya kendaraan operasional bagi pegawai dalam melakukan kontrol di 27 Sekolah Dasar se Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang.

Ketiadaan sarana transportasi tersebut (motor atau mobil) merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi ketercapaian kinerja yang optimal. Esensi dasar ketersediaan sarana dan prasarana bagi Korwilcambidik Kutawaluya berdasarkan analisis peneliti yaitu memiliki kegunaan dalam kelancaran proses pekerjaan, di samping terjaminnya kelancaran hubungan kerja internal dan eksternal antar aparaturnya atau pegawai yang berpangkal dari kemudahan komunikasi. Lebih dari itu lengkapnya fasilitas tersebut mendukung kelancaran dalam rangka pengawasan

serta upaya mengakomodir kebutuhan Sekolah Dasar di Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang. Berdasarkan hal tersebut dalam merespon perkembangan zaman, idealnya Korwilcambidik Kutawaluya sebagai organisasi pemerintah saat ini sudah tidak memiliki kendala perihal kurangnya sarana transportasi.

Guna menutupi ketercapaian mengakomodir kebutuhan Sekolah Dasar saat ini, dikarenakan terbatasnya sarana transportasi yang berdampak terhadap arus komunikasi antara Korwilcambidik Kutawaluya dengan Sekolah Dasar se Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang maka komunikasi lebih dominan menggunakan *smartphone* dengan bebasikan aplikasi *Whatsapp* yang digunakan oleh Korwilcambidik Kutawaluya dalam melakukan komunikasi, transparansi maupun publikasi terkait penyelenggaraan sarana dan prasarana di 27 Sekolah Dasar pada area kerjanya.

Komunikasi yang terbangun antara Kepala Sekolah (Kepsek) dengan aparatur maupun Kepala Korwilcambidik Kutawaluya telah *match* bergabung dalam *Whatsapp group*. Kondisi tersebut merupakan tren menuju kearah perbaikan dengan memanfaatkan media komunikasi yang sudah dimiliki oleh seluruh *stakeholders* berkepentingan di Kecamatan Kutawaluya, yang mana transparansi atau publikasi mengenai penyelenggaraan sarana dan prasarana, di samping upaya pelaporan terhadap

kebutuhan SD dapat langsung tersampaikan kepada Korwilcambidik. Dengan menjalin komunikasi yang intensif dengan seluruh *stakeholder* di wilayah kerja yang menjadi kewenangannya. Bahawasannya keterbukaan informasi merupakan hal yang penting pada era globalisasi saat ini, bahkan menjadi ukuran dalam salah satu aspek penyelenggaraan pemerintah yang baik atau *good governance*.

Di lain sisi dalam merespon tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan prima dalam bidang pendidikan Penggunaan teknologi informasi berbasis internet sudah digunakan oleh Korwilcambidik, meskipun dalam melakukan pengelolaan data masih terdapat pegawai yang melimpahkan tugas terhadap pegawai lainnya. Upaya dalam mengoptimalkan kinerja organisasi melalui pemanfaatan sarana sudah mulai dilakukan Korwilcambidik Kutawaluya salah satunya dalam melakukan kontrol, disiplin pegawai berbasis aplikasi yang dinamakan SIAP (Sistem Informasi Absensi Pegawai) sebagai pengganti mesin *fingerprint*. Bahwasannya SIAP merupakan aplikasi *on-line* berbasis GPS (*Global Positioning Sistem*) yang dioprasionalisasikan melalui *android* maupun *website*.

Aplikasi SIAP memiliki cara kerja dengan menggunakan *triple veripication* yang terdiri dari GPS, selfi, dan verifikasi oleh atasan langsung. Dengan menggunakan aplikasi tersebut seluruh aparatur di Kabupaten

Karawang khususnya Korwilcambidik Kutawaluya diharapkan akan dapat bekerja dengan optimal dalam melakukan pelayanan. Dengan aplikasi SIAP Korwilcambidik Kutawaluya dapat memastikan posisi pegawai/aparatur yang sedang melakukan tugasnya, aplikasi tersebut mampu meminimalkan kecurangan pegawai yang mangkir/membolos di jam kerja, ihwal tersebut merupakan upaya nyata menghadirkan pelayanan prima dalam bidang pendidikan khususnya pada domain Sekolah Dasar.

KESIMPULAN

Faktor SDM menjadi sangat esensial dalam pelayanan publik dalam bidang pendidikan, SDM di Korwilcambidik Kutawaluya dapat dikatakan masih belum optimal, di samping belum menempatkan prinsip *the right man on the right place* yang berdampak pada penguasaan teknologi informasi komunikasi berbasis komputerisasi yang masih minim. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya layanan yang harus langsung melalui tatap muka.

Terkait fasilitas sarana dan prasarana organisasi Korwilcambidik Kutawaluya dalam meningkatkan kinerja organisasi berdasarkan aspek sarana dan prasarana masih kurang optimal, terlihat dari belum adanya fasilitas berupa kendaraan dinas (kendaraan operasional). Hal tersebut minimalisir dengan upaya kontrol dan komunikasi yang intensif melalui aplikasi *whatsapp*. Lebih dari itu guna

memastikan kinerja aparatur pegawai Korwilcambidik Kutawaluya salah satunya melalui peningkatan disiplin pegawai, di Kabupaten Karawang sudah mengandalkan aplikasi SIAP sebagai pengganti mesin *fingerprint* guna memastikan kehadiran dan kesiapsiagaan aparatur.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. (2001). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Craphindo Persada.
- Creswell, John W. (2014). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Denzin, Norman K. Dan Yvonna S. Lincoln. (2009). *Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc.
- Ruky, Achmad. (2006). *Sistem Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Susilo Martoyo. (1992). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Sukirno. (2006). *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Perenada Media Group.
- Dokumen**
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengenai Pendidikan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2005
*tentang Standar Nasional
Pendidikan.*

Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 32 Tahun 2013
*tentang Standar
Nasional Pendidikan.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 7 Tahun 2006 tentang
*Standarisasi Sarana dan
Prasarana Kerja Pemerintah
Daerah*

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 24 Tahun 2007 Tanggal 28
Juni 2007 *Standar Sarana dan
Prasarana untuk Sekolah Dasar/
Madrasah Ibtidaiyah (SD/ MI),
Sekolah Menengah Pertama/
Madrasah Tsanawiyah (SMP/
MTs), dan sekolah menengah
atas/ madrasah aliyah (SMA/ MA).*

Peraturan Menteri Pendidikan Dan
Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 56 Tahun 2011 Tentang
*Petunjuk Teknis Penggunaan Dana
Alokasi Khusus Bidang Pendidikan
Tahun Anggaran 2012 Untuk
Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar
Biasa.*

Peraturan Bupati Karawang, Nomor 81
Tahun 2016 tentang *Pembentukan,
Rincian Tugas, Fungsi dan Tata*

*Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pendidikan Anak Usia Dini dan
Sekolah Dasar pada Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga.*

Internet

Dodo. (2018). Lebih dari seribu ruang
SD di Karawang Rusak.
[https://www.pikiran-
rakyat.com/jawa-
barat/amp/pr-01294843/lebih-
dari-seribu-ruang-kelas-sd-di-
karawang-rusak -421295](https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/amp/pr-01294843/lebih-dari-seribu-ruang-kelas-sd-di-karawang-rusak-421295)
(Diakses pada 12-12-2019).

Hartato. (2008). Permasalahan
Pendidikan.[http://fatamorgana.
wordpress.com/2008/07/22/ba-
bvii-permasalahan-
pendidikan/](http://fatamorgana.wordpress.com/2008/07/22/ba-bvii-permasalahan-pendidikan/) (Diakses pada
22:32 WIB, Tanggal 10-07-
2018).

[http://dispendik.gresikkab.go.id/profil/
profil-uptd-kecamatan/uptd-
Bungah](http://dispendik.gresikkab.go.id/profil/profil-uptd-kecamatan/uptd-Bungah) , diunduh pada
tanggal 13 Juli 2018 jam
09:17 WIB.

[http://www.google.com/amp/s/www.de-
jurnal.com/2019/08/dak-
bidang-sd-karawang-rp-545-
miliar-fasilitator -raup-upah-
800-juta/amp/](http://www.google.com/amp/s/www.dejurnal.com/2019/08/dak-bidang-sd-karawang-rp-545-miliar-fasilitator-raup-upah-800-juta/amp/) Diakses pada
22:32 WIB, Tanggal 10-01-
2020)